

## **Sejarah dan Pembagian Tugas BAKAMLA**

**Anggie Chyntia**

[anggiechynt@gmail.com](mailto:anggiechynt@gmail.com)

Laut menjadi komponen strategis bagi kehidupan suatu bangsa, pun Indonesia yang memiliki luas laut lebih dari 75% dari total keseluruhan. Luas laut Indonesia yang mencapai sekitar 5,8 juta kilometer persegi, dimana hal tersebut jauh lebih luas dari daratannya yang hanya sekitar 2,012 juta kilometer persegi. Kondisi geografis Indonesia yang semacam itu membuat Indonesia memiliki banyak pulau bahkan menjadi salah satu negara kepulauan terbanyak di dunia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (Databoks, 2021). Sebagai negara kepulauan, laut Indonesia menjadi jalur transportasi yang penting untuk menghubungkan antar pulau yang ada. Tidak heran jika Indonesia menjadi negara kepulauan bahkan poros maritim dunia. Untuk menunjang hal tersebut, maka pemerintah Indonesia membentuk lembaga untuk melindungi keamanan laut Indonesia salah satunya adalah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI).

### **Sejarah Bakamla**

Pada awalnya pemerintah Indonesia membentuk Bakamla yang bertugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan wilayah kedaulatan dan perairan Indonesia. Bakamla sendiri merupakan badan atau lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Pada awalnya Bakamla bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla RI) yang merupakan lembaga non struktural dengan tugas sama seperti Bakamla. Bakorkamla dibentuk dengan Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1;KEP-085/J.A/12/1972 tahun 1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di laut dan Komando Pelaksanaan Operasi Bersama Keamanan di Laut. Bakorkamla atau Bakamla dibentuk melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Mulia (Hasan, n.d.).

Pembentukan Bakamla bukanlah semata-mata untuk melakukan patroli di wilayah perairan Indonesia namun juga untuk meningkatkan kualitas dan potensi bangsa yang dapat berasal dari wilayah perairan serta melindungi dari berbagai ancaman yang ada. Keadaan yang terus berkembang membuat pemerintah perlu melakukan pengembangan dan pembaharuan terhadap peraturan yang menyangkut Badan Koordinasi Keamanan Laut untuk meningkatkan koordinasi antar beragam instansi pemerintah di sektor keamanan laut. Untuk merealisasikan hal tersebut, melalui Keputusan Menteri Koordinator Bagian Politik dan Keamanan Nomor Kep.05/Menko/polkam/2/2003, dilakukan kumpulan Kerja Perencanaan Pembangunan Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut. Mengingat bahwa Bakorkamla akan menyusun kebijakan nasional terkait keamanan wilayah Indonesia maka perlu dilakukan persiapan yang matang hingga pada 29 Desember 2005, setelah melewati serangkaian seminar dan rapat koordinasi maka diputuskan

melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi dasar hukum dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (Hasan, n.d.).

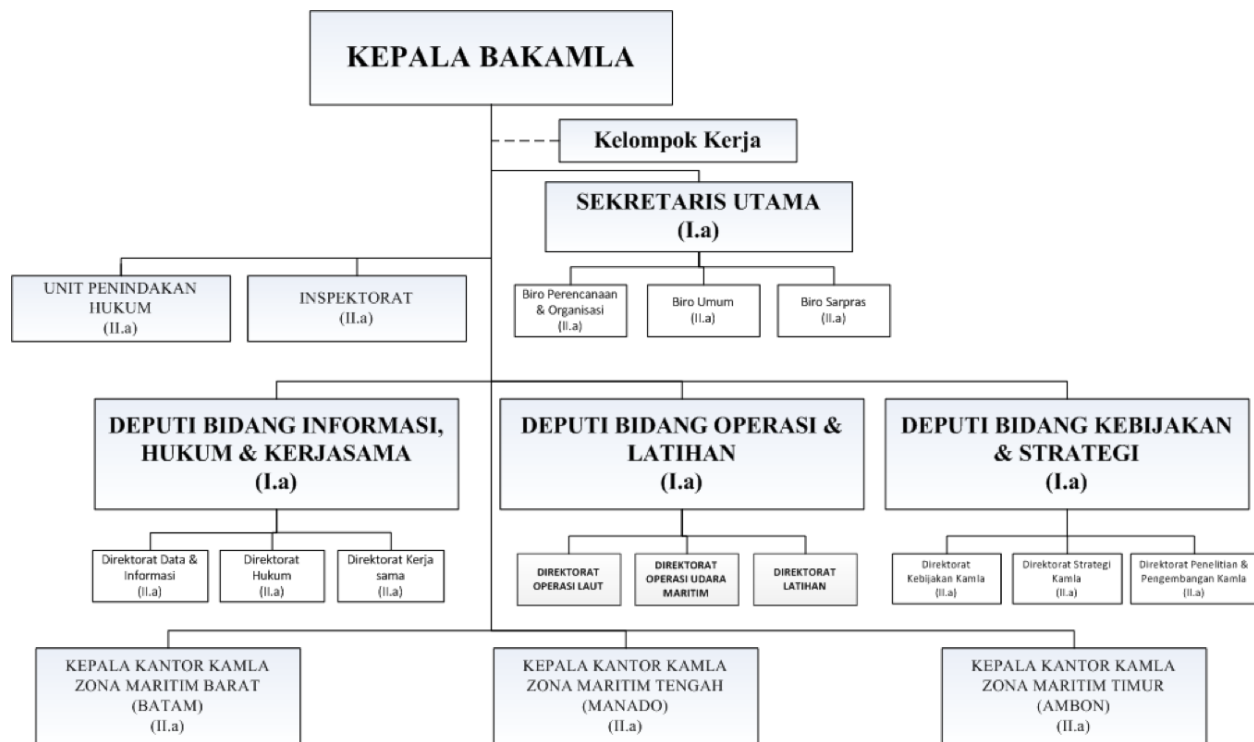
Setelah berproses cukup lama hingga disahkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Keamanan, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) resmi berganti nama menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Undang-undang yang ditandatangani Bapak Presiden Indonesia Joko Widodo tersebut menyebutkan bahwa Bakamla dikoordinasikan oleh Menko bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) dan Bakamla memiliki tugas untuk melakukan patrol keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia atau wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landasan Kontinen dan Zona Tambahan. Luas Landas Kontinen yang mencapai kedalaman 200 meter dan batas laut teritorial sejauh 12 mil dari garis lurus serta perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil dari garis dasar laut (Lasabuda, 2013), ditambah kekayaan alam Indonesia yang sangat kaya tentu dapat menjadi ancaman bagi negara Indonesia sendiri. Penjagaan wilayah perairan Indonesia harus direncanakan secara matang.

### **Profil Bakamla**

Sebagai badan yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bakamla menjadi badan yang dilengkapi dengan struktur organisasi bahkan visi misi yang jelas dalam sub bab ini akan dijelaskan secara urut dan lengkap terkait seluruh komponen yang termasuk dalam profil dari Bakamla.

### **Struktur Organisasi dan *Jobdesk* Bakamla**

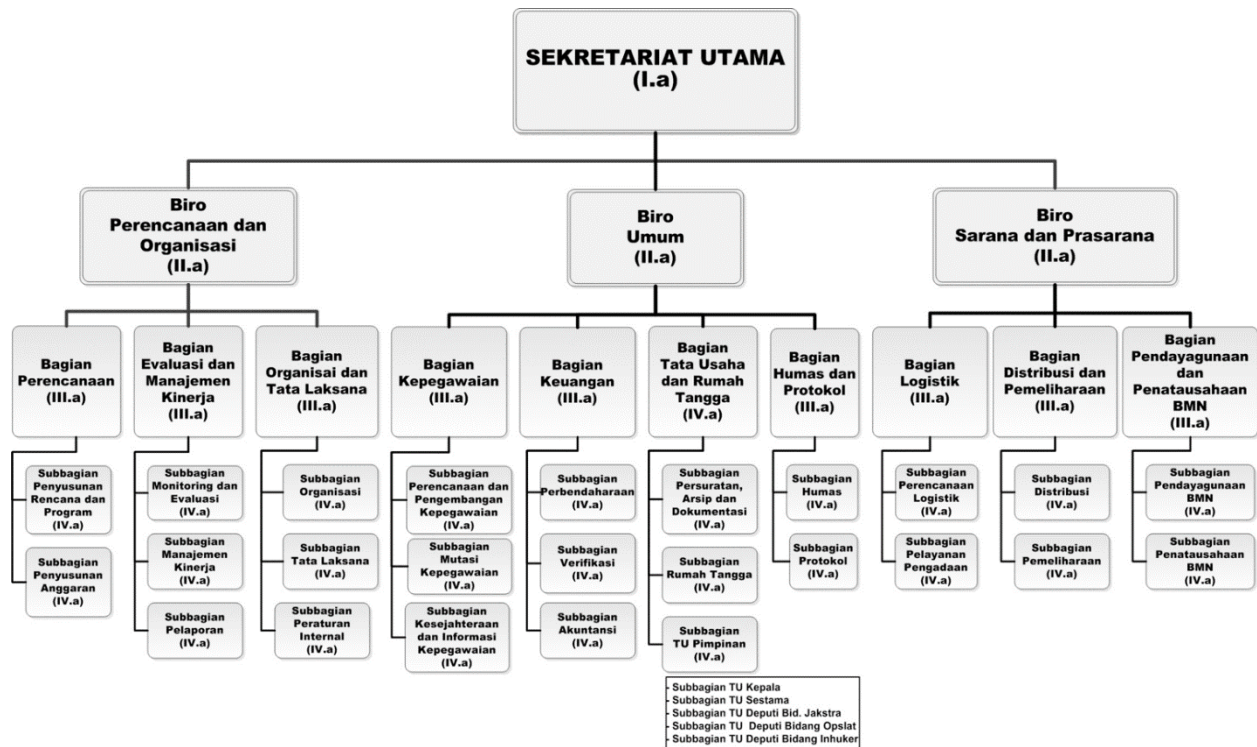
Sebagai sebuah badan, Bakamla tentu memiliki susunan struktur organisasi untuk mengkoordinir dan menunjang fokus tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut merupakan bagan dari struktur organisasi yang ada di Bakamla, yaitu :



Gambar 1 Struktur Organisasi Bakamla

Sumber : <https://bakamla.go.id/profil/strukturorganisasi>

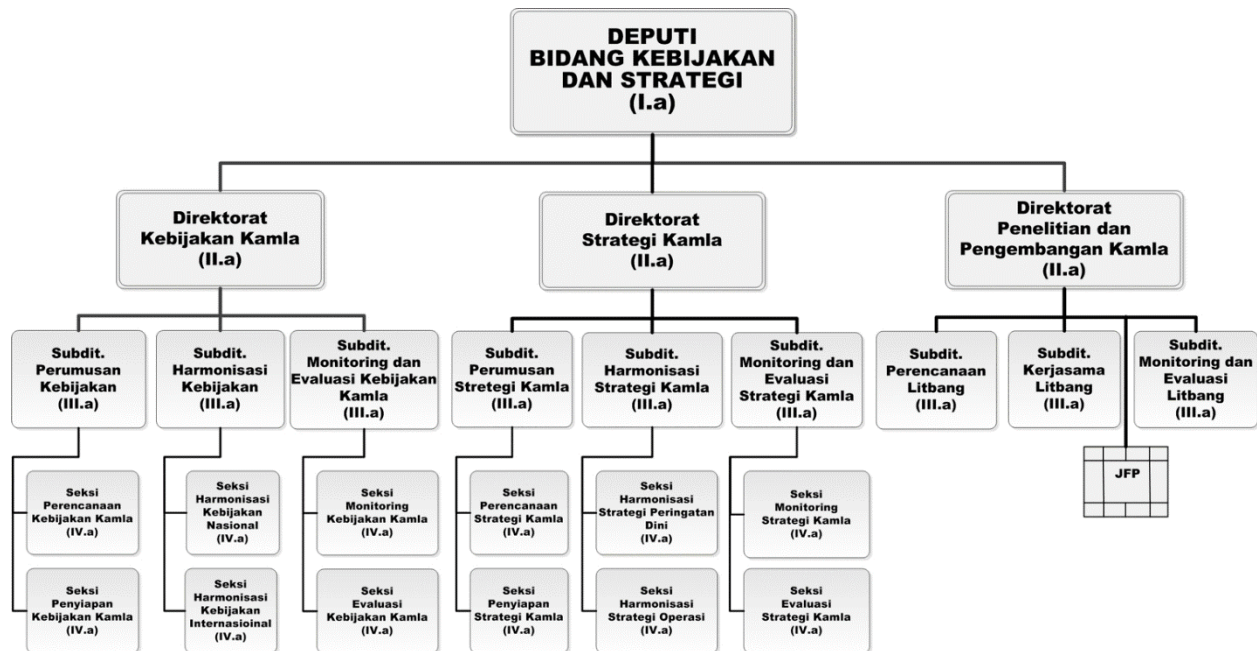
Sesuai dengan bagan yang tertera, sejak 31 Januari 2020 Bakamla dikepalai oleh Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, S. Sos., M.M. Beliau merupakan seorang perwira tinggi TNI-AL dan jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/TPA/2020. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Pasal 6, Kepala Bakamla mempunyai tugas memimpin Bakamla dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bakamla. Struktur organisasi Bakamla menjadi sangat kompleks karena per deputi bidang akan dilakukan pembagian tugas termasuk pada Sekretaris Utama; Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerjasama; Deputi Bidang Operasi dan Latihan; Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi; Inspektorat; dan Kepala Kantor Kamla Zona Maritim. Pembagian susunan organisasi dari masing-masing bidang akan digambarkan melalui sebuah bagan di bawah ini :



Gambar 2 Struktur Organisasi Bakamla - Sekretariat Utama

Sumber : <https://bakamla.go.id/profil/strukturorganisasi>

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, dijelaskan bahwa pada Pasal 7 (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala; (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama. Adapun Pasal 8 mengatakan bahwa Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bakamla.

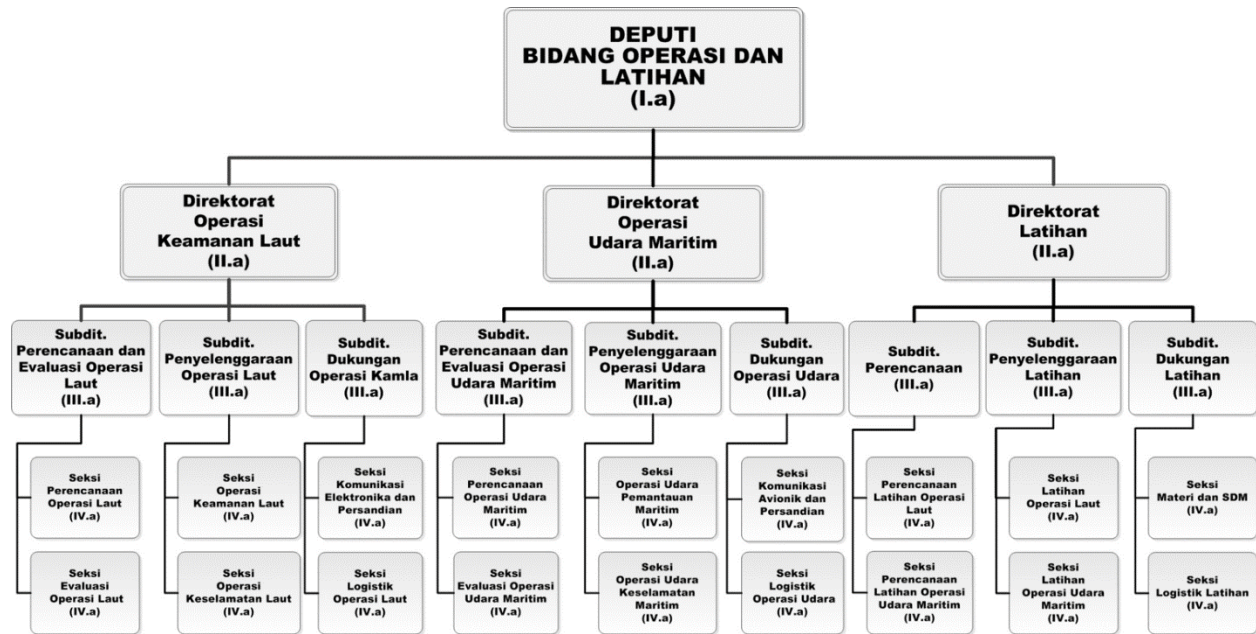


Gambar 3 Struktur Organisasi Bakamla - Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi

Sumber : <https://bakamla.go.id/profil/strukturorganisasi>

Pada Pasal 11 Perpres Nomor 178 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi adalah unsur pelaksana di bidang penyiapan kebijakan serta strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Deputi ini memiliki tugas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

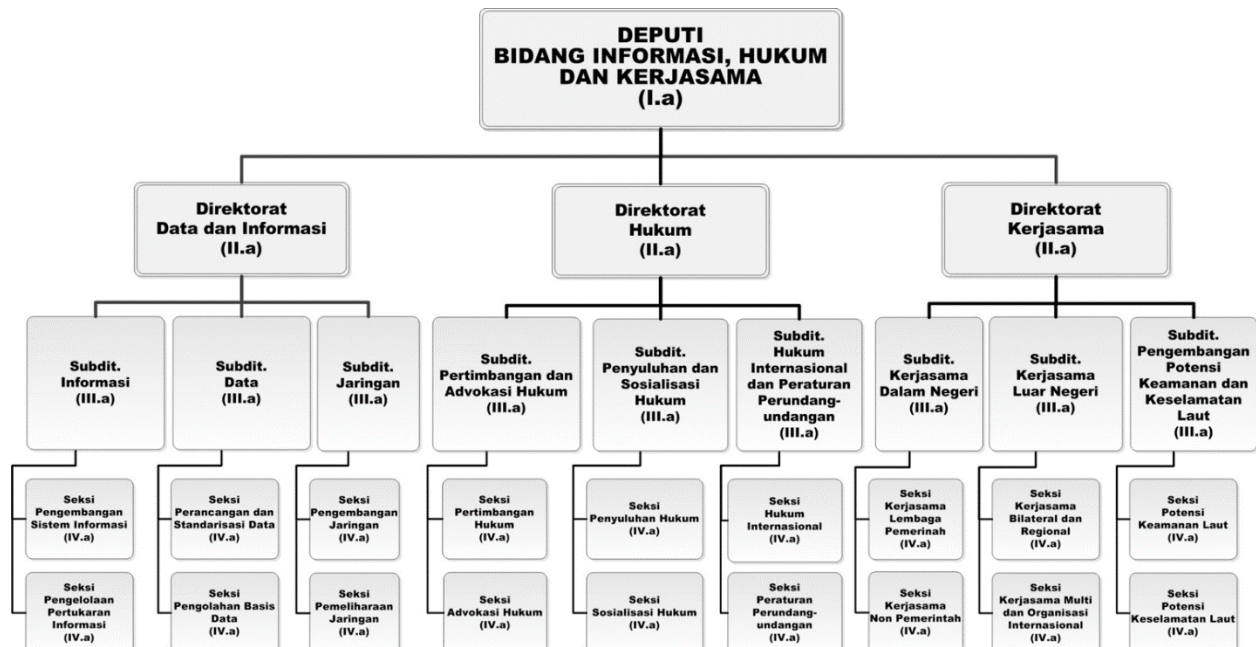




Gambar 4 Struktur Organisasi Bakamla - Deputy Bidang Operasi dan Latihan

Sumber : <https://bakamla.go.id/profil/strukturorganisasi>

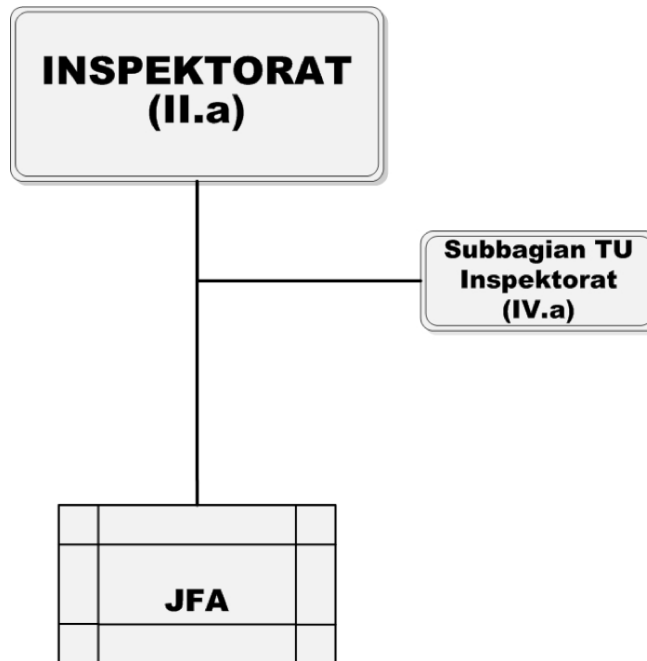
Pada Deputy Bidang Operasi dan Latihan menurut Perpres Nomor 178 Tahun 2014 adalah unsur pelaksana di bidang operasi dan latihan, yang berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala. Deputy ini memiliki tugas untuk melaksanakan operasi dan latihan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk penyusunan norma, standar, kriteria dan prosedur mengenai keberlangsungan operasi dan latihan, penindakan, pengejaran, pengawasan serta penyimpanan barang bukti sebelum diserahkan ke pihak berwajib.



Gambar 5 Struktur Organisasi Bakamla - Deputi Informas, Hukum dan Kerjasama

Sumber : <https://bakamla.go.id/profil/strukturorganisasi>

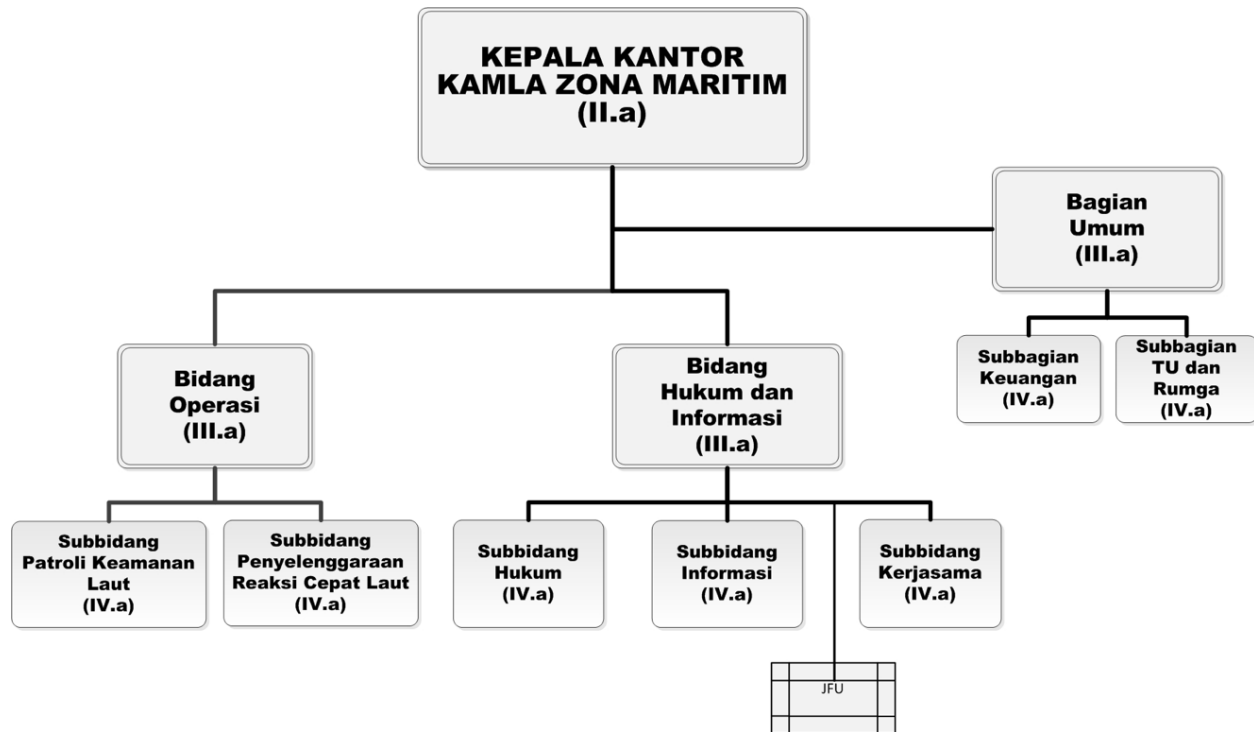
Kembali merujuk pada Perpres Nomor 178 Tahun 2014, tugas dari Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama diatur dalam Pasal 20. Sedangkan deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama itu sendiri adalah unsur pelaksana di bidang informasi, hukum dan kerjasama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Deputi ini mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis di bidang informasi, hukum dan kerja sama penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal tersebut termasuk penyusunan dan pelaksanaan prosedur kerjasama nasional, regional dan multilateral di bidangnya, pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam bidang informasi, hukum dan kerja sama.



Gambar 6 Struktur Organisasi Bakamla – Inspektorat

Sumber : <https://bakamla.go.id/profil/strukturorganisasi>

Inspektorat menjadi unsur pengawas dalam struktur organisasi Bakamla. Inspektorat dalam hal ini adalah unsur pengawasan intern Bakamla yang sama seperti Deputi yang lain, Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan melakukan koordinasi administrasi oleh Sekretaris Utama. Tugas pengawasan intern Inspektorat termasuk menyiapkan dan melaksanakan perumusan kebijakan pengawasan intern, penyusunan laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan administrasi Inspektorat.



Gambar 7 Struktur Organisasi Bakamla - Kepala Kantor Kamla Zona Maritim

Sumber : <https://bakamla.go.id/profil/strukturorganisasi>

Bagian organisasi Bakamla ini memiliki tugas untuk melaksanakan penindakan, penyelidikan dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum laut dengan pembentukan Unit Penindakan Laut dan merepresentasikan lembaga dengan kewenangan untuk menegakkan hukum laut yang berlaku. Sedangkan untuk tugas teknis operasional dan tugas penunjang lainnya akan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis. Hal tersebut dibentuk untuk menunjang kinerja dari Bakamla dalam menjaga keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi perairan Indonesia dan berbagai ancaman yang mungkin dapat terjadi.

### Instansi Terkait

Bakamla menjadi sebuah badan yang bertugas untuk menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan dalam dunia internasional Bakama memiliki nama *Indonesia Coast Guard* (ICG). Namun faktanya badan atau instansi yang memiliki tugas seperti Bakamla tidak hanya satu. Terdapat beberapa badan yang berwenang atas keamanan laut Indonesia, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Air (Polair), Bea Cukai (BC), Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), dan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) (Nazili Abdul Azis, 2016). Dari sekian banyak badan yang memiliki kewenangan mirip dengan Bakamla adalah Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP). Dalam kancah internasional KPLP dikenal dengan *Indonesian Sea and Coast Guard* (ISCG) dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pelayaran, berbunyi “Peayaran merupakan satu kesatuan system yang terdiri atas angkatan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim”, (Indonesia, Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, 2008). KLPL memiliki tugas lebih spesifik yaitu menegakkan hukum keamanan dan keselamatan laut Indonesia di bidang pelayaran internasional.

Meskipun badan di atas memiliki tugas besar yang sama yaitu menjaga keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia, namun terdapat beberapa perbedaan untuk tugas yang lebih spesifik, misal TNI AL selain menjaga keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia, TNI AL juga memiliki tugas diplomasi untuk mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah juga bertugas untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut. Sedangkan Polisi Air memiliki tugas spesifik, yaitu melakukan patrol perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan serta pencarian dan penyelamatan apabila terjadi kecelakaan di perairan. Pada Bea dan Cukai memiliki tugas spesifik yaitu untuk melaksanakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan arus barang masuk dan keluar daerah pabean termasuk melakukan pemungutan bea masuk dan cukai dari negara lain berdasarkan pada undang-undang yang berlaku. Hal tersebut berbeda dengan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), yang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan di bidang pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengelolaan ruang laut, operasi kapal pengawasan dan pemantauan serta peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan juga mengatur kebijakan tindak pidana kelautan dan perikanan (Perikanan, n.d.). Dapat diartikan bahwa PSDKP lebih berfokus untuk mengatur tentang sumber daya alam yang berada di laut dan sekitarnya.

### **Visi dan Misi Bakamla**

Bakamla memiliki visi yang digunakan sebagai gambaran besar mengenai apa yang ingin dicapai dan misi yang menjadi penjabaran dari apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Berikut merupakan visi dan misi dari Bakamla, yaitu :

#### **Visi**

“Terwujudnya keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya dan profesional dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.”

#### **Misi**

1. Meningkatkan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia dengan berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan internasional.
2. Memperkuat kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah yurisdiksi Indonesia untuk memperkuat jati diri Indonesia sebagai poros maritime dunia.
3. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan yang mandiri dan kuat berbasis kepentingan nasional di wilayah perairan Indonesia dan di wilayah yurisdiksi Indonesia.

## **Tujuan Dibentuknya Bakamla**

Sebagai badan yang dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Bakamla memiliki 2 tujuan utama, yaitu :

1. Terwujudnya keamanan dan keselamatan di wilayah di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan sistem informasi/sistem peringatan dini dan *coast guard* diplomasi yang berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan internasional.
2. Terwujudnya kapasitas kelembagaan, tersedianya sarana dan prasarana operasi keamanan dan keselamatan laut dan sumber daya manusia yang profesional, handal dan lugu.

(Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, n.d.)

## **Sasaran Strategis**

Bakamla dibentuk juga dengan sasaran strategis agar dapat menjadi standar capaian dan dapat menjadi evaluasi agar kinerja yang diberikan tetap yang terbaik. Berikut merupakan sasaran strategis dari Bakamla, yaitu :

1. Meningkatkan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terpadu.
2. Meningkatnya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang kredibel.
3. Mewujudkan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi.
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan keamanan laut yang efisien dan modern,
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur keamanan laut yang profesional, berkompentensi tinggi dan non sektoral.
6. Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis sistem peringatan dini.

(Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, n.d.)

## Makna Logo Bakamla



Gambar 8 Logo Bakamla

Sumber : <https://bakamla.go.id/profil/logo>

Bakamla memiliki simbol dengan maknanya masing-masing dari setiap elemen yang digunakan, yaitu :

- Terdapat tulisan berbahasa Indonesia Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menjadi identitas dan nama dari badan tersebut. Bakamla dalam bahasa Inggris adaah *Indonesia Maritime Security Board* (IMSB) atau Indonesian *Coast Guard*.
- Simbol Garuda menjadi arti dari lambang negara Indonesia.
- Bola Dunia memiliki arti dari siap melaksanakan tugas-tugas yang ada baik dalam segi nasional maupun internasional.
- Jangkar melambangkan lingkup kerja Bakamla yang ada di wilayah laut.
- Tombak Bermata Tiga, merupakan senjata dari tokoh mitologi Yunani yang dianggap sebagai Dewa Laut yaitu Dewa Neptunus. Tombak bermata tiga menjadi simbol dari kekuatan dan kemampuan agar mampu mewujudkan keselamatan, keamanan dan tegaknya hukum di wilayah perairan Indonesia.
- Tambang menjadi simbol dari persatuan.
- Kesatuan Bintang yang menjadi cerminan semangat pengabdian dan kehormatan bangsa dan negara dari Bakamla.

(Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, n.d.)

## Sumber Pendanaan

Sebagai badan yang berfungsi untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan yurisdiksi perairan Indonesia tentu saja Bakamla membutuhkan sarana untuk menunjang kinerjanya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan

Laut Pasal 42 dikatakan bahwa, “Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bakamla dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Negara”. Anggaran Bakamla pada tahun 2020 yang disetujui DPR mencapai Rp. 400 miliar (Sutari, 2020).

## DAFTAR PUSTAKA

- Arisanto, P. T., & Pratiwi, T. S. (2020). Kebijakan Kriminalisasi LGBT Malawi Di Tengah Pengaruh Kelompok Kepentingan dan Politik Bantuan Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(1), 69–86.
- Arisanto, P. T., & Adi Wibawa. (2021). PERANG DAGANG ERA DONALD TRUMP SEBAGAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI ADAPTIF CONVULSIVE AMERIKA SERIKAT. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 163-183.
- Aziz Abdul, dkk; “*Kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dalam Pelaksanaan Pengamanan di Wiayah Perairan Indonesia*”; *Diponegoro Law Journal*; Volume 5 Nomor 4; Universitas Diponegoro, 2016.
- Hapsari Indah Dewi, dkk; “*Analisis Kinerja Satker Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan ratu Sukabumi Jawa Barat*”; *Jurnal od Fisheries Resources Utilization Management and Technology*; Volume 2, Nomor 1; Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan; Universitas Diponegoro; 2013.
- Iswardhana, Muhammad Ridha; Salam, Usmar. (2015). *Strategi Thailand Dalam Recovery Pariwisata Terhadap Peningkatan International Tourist Arrivals (ITA) Pasca Kerusuhan Politik Tahun 2010-2013*. Tesis Universitas Gadjah Mada.
- Iswardhana, Muhammad Ridha; Hapsari Maharani. (2016). *Analisis Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdagangan Dumping Barang WTO: Studi Kasus Sengketa Kertas Indonesia-Korea Selatan*. Skripsi Universitas Gadjah Mada.
- Iswardhana, M. R. (2018). Quo Vadis International Trade: Indonesian Diplomacy Strategy Regarding Settlement WTO with South Korea. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(1), 113–124.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2020). Indonesia's South-South and Triangular Cooperation (SSTC) as the Future of Diplomacy for World Solidarity to Overcome the COVID-19 Pandemic. *Global South Review*, 2(1), 25-33.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2020). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Merajut Kebinekaan dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri*. Sleman: PT Kanisius. 133-136.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2021). Cyber Diplomacy And Protection Measures Against Threats Of Information Communication Technology In Indonesia. *Journal of Islamic World and Politics*, 5(2), 345-351.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2021). Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 4(1), 1-13.

- Iswardhana, Muhammad Ridha; Widiono Suyud. (2021). *Diplomasi Siber Dan Teknologi Mobile Pada Multidisiplin*. Padang: Partnership on Action for Community Education (PACE). 3-10.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2022). Geoekonomi Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB). *DEFENDONESIA*, 6(1), 5-6.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2022). *Sejarah Invasi Rusia di Ukraina Dalam Kaca Mata Geopolitik*. Yogyakarta: AIHII Press. 1-12.
- Iswardhana, Muhammad Ridha; Arisanto, Puguh Toko. (2022). Implementasi Smart Power Dan Linkage Issues Indonesia Dalam Perlindungan Kedaulatan Maritim Di Kepulauan Natuna. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 1(14), No.2.
- Iswardhana, Muhammad Ridha, Winanti, P., & Nurhayati, R. (2022). Promoting Education and Training as Efforts to Improve Human Resources in African Developing Countries. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 14(2), 767-782. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i2.3698>.
- Iswardhana, Muhammad Ridha. (2023). Meninjau Kembali Kasus Suap Jaksa Pinangki Berdasarkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1081-1088.
- Iswardhana, Muhammad Ridha; Attamimi, Attina Maulidia Selma. (2023). Efektivitas Penerapan Kebijakan Otonomi Daerah Dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Bandung Barat Tahun 2019. *JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN)*, 6(2), 109-120.
- Iswardhana, M. R., Arisanto, P. T., Chusnul Chotimah, H. ., Wibawa, A. ., Risky, L., & Setyo Pratiwi, T. (2023). SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK MENYONGSONG PEMILU 2024 TERHADAP GENERASI Z DI SMAN 4 YOGYAKARTA. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(1), 6–10.
- Purnama, Ari Bayu; Iswardhana, Muhammad Ridha. (2022). Kalimantan Border Issues And Indonesia's Border Diplomacy Towards Malaysia. *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 105-107.
- Lasabuda Ridwan; “Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut Dalam Prespektif Negara Kepulauan Republik Indonesia”; *Jurnal Ilmiah Platax*; Vol. I-2; Januari 2013.
- Nurmamurti, R. A., Navila, S. F., Budi, E. S., Amanda, A. C., & Kholifah, D. S. (2022). Kebijakan Amerika Serikat dalam Menjaga Eksistensi Pasar Global Melalui Perusahaan Coca-Cola (Kapitalisme : Coca Colonization). *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, 4(1), 64–74. <https://doi.org/10.51747/publicio.v4i1.925>.
- Pratiwi, T. S. (2018). Understanding the Movement of Suku Anak Dalam Bathin Sembilan Againts Land Conflict with PT. Asiatic Persada in Jambi Through Social Movement Theory.



- TRANSBORDERS: International Relations Journal, 2(1), 1.  
<https://doi.org/10.23969/transborders.v2i1.859>.
- Pratiwi, T. S. (2020). An Analysis of Humanitarian Military Intervention in Nigeria: Focus on Saving Victims or Defeating Boko Haram? Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS), 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v2i2.41>.
- Pratiwi, T. S., Aliya Hamida, Galih Antonius Ola Lewoema, & Ahmed Varrel Alkahfi Mauza. (2022). ANALISIS KAMPANYE DONASI ORGANISASI COME BACK ALIVE DALAM UPAYA MEMPRODUKSI KEAMANAN DI PERANG RUSIA-UKRAINA TAHUN 2022. Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS), 4(2), 1–15. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i2.104>.
- Rizky, L. (2015). Bisnis Sosial: Sintesis Muhammad Yunus untuk Menggerakkan Kapitalisme di Bangladesh. Jurnal Hubungan Internasional, 4(1), 23–34. <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0063.23-34>.
- Rizky, L., & Bin Supriyadi, H. S. K. (2021). Dampak Masuknya Imigran Timur Tengah terhadap Keamanan Manusia Domestik dan Respon Kebijakan Amerika Serikat Era Donald Trump. JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN), 4(2), 15–28. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i2.1944>.
- Rizky, L., Pratiwi, T. S., Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2021). Budidaya Jamur pada Ibu-Ibu Rumah Tanga di Dusun Kruwet untuk Mewujudkan SDGs 2030. Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(3), 177–185.
- Rizky, L., Salampessy, M. A. S., & Achdyana, I. (2022a). Effectiveness of The Convention on the Rights of the Child (CRC) Regime by UNICEF in Encouraging the Implementation of Child Protection in SoutheastAsian Countries. JASSP, 2(1), 12–20. <https://doi.org/10.23960/jassp.v2i1.50>.
- Runtukahu Jurian;”*Tanggung Jawab Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia*”; Lex et Societatis, Vol. IV/No. 1; 2016.
- Siagian, M., & Pratiwi, T. (2018). Narcoterrorism in Afghanistan. Jurnal ICMES, 2(2), 158-178.
- Tanaem, E., & Arisanto, P. (2020). Rezim Global dan Liberalisasi Perdagangan Sektor Garam di Indonesia. Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan, 12(2), 120 - 139.
- Wasisto Gentur; “*Kewenangan Bakamla Dalam Pengegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*”; Program Study Magister Ilmu Hukum; Fakultas Hukum; Universitas Brawijaya; 2015.
- Wibawa, A. and Arisanto, P. T. (2019) “Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antardaerah pada Masa Kepemimpinan Jiang Zemin dan Hu Jintao”, Nation

State: Journal of International Studies, 2(2), pp. 105-122. doi: 10.24076/NSJIS.2019v2i2.152.

### Situs Internet

- “Badan Keamanan Laut Republik Indonesia”, diakses melalui [http://p2k.unkris.ac.id/id1/3065-2962/Bakamla\\_236519\\_p2k-unkris.html](http://p2k.unkris.ac.id/id1/3065-2962/Bakamla_236519_p2k-unkris.html) pada Kamis, 15 Juli 2021.
- “Badan Keamanan Laut Republik Indonesia”, diakses melalui <https://bakamla.go.id/profil/tugasfungsi> pada Kamis, 15 Juli 2021.
- “Berapa Jumlah Pulau di Indonesia?”; diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/16/berapa-jumlah-pulau-di-indonesia> pada Kamis, 22 Juli 2021.
- “Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistance”, diakses melalui <https://www.beacukai.go.id/berita/direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-sebagai-trade-facilitator-dan-industrial-assistance.html> pada Jumat, 23 Juli 2021.
- “Inilah Perpres No. 178/2014 Tentang Pembentukan Badan Keamanan Laut”, diakses melalui <https://setkab.go.id/inilah-pepres-no-1782014-tentang-pembentukan-badan-keamanan-laut/> pada Kamis, 22 Juli 2021.
- “Profil Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, diakses melalui <https://kkp.go.id/djpsdkp/page/164-profil> pada Jumat, 23 Juli 2021.
- “Tugas dan Fungsi Pokok Sat Polair”, diakses melalui <https://info-polressintang.com/tugas-dan-fungsi-pokok-sat-polair/> pada Jumat, 23 Juli 2021.
- “Tugas TNI Angkatan Laut”, diakses melalui <https://www.tnial.mil.id/tugas/> pada Jumat, 23 Juli 2021.
- Sutari Tiara, “DPR Dukung Penambahan Anggaran Bakamla Untuk Jaga Natuna”, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200113130204-32-464853/dpr-dukung-penambahan-anggaran-bakamla-untuk-jaga-natuna> pada Kamis, 22 Juli 2021.